



Peran Pemerintah dalam Transformasi Digital dan Implikasinya terhadap *Cyber Democracy* di Timor Leste

Mericio J. Dos Reis, Ardli Johan Kusuma

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

E-mail: leonakara3@gmail.com,

Kata Kunci:

Peran
Pemerintah;
Transformasi
Digital; Cyber
Democracy;
Timor Leste

Abstrak

Sebagai negara muda pasca-konflik, Timor-Leste menghadapi tantangan signifikan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan demokratis. Dalam dekade terakhir, transformasi digital telah menjadi agenda strategis pemerintah untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik. Namun, implementasi kebijakan digital dan dampaknya terhadap perkembangan demokrasi digital masih perlu dikaji secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Timor Leste dalam mendorong transformasi digital serta implikasinya terhadap perkembangan *cyber democracy*. Fokus kajian diarahkan pada kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur digital, memperluas akses teknologi informasi, dan mengintegrasikan layanan publik berbasis digital sebagai bagian dari agenda modernisasi negara. Selain itu, penelitian ini mengkaji sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi pada penguatan partisipasi politik warga di ruang digital, pembentukan wacana publik daring, dan dinamika politik digital di Timor Leste. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah literatur akademik, laporan kebijakan, dan data statistik terkini. Analisis dilakukan menggunakan kerangka teori *network society* dan *hybrid media system* untuk memahami hubungan antara kebijakan digital pemerintah, infrastruktur komunikasi, dan demokrasi berbasis internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital di Timor Leste telah memberikan peluang baru bagi partisipasi politik yang lebih inklusif, namun masih dihadapkan pada tantangan berupa kesenjangan digital, rendahnya literasi teknologi, dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian politik digital dan memberikan masukan kebijakan untuk memperkuat demokrasi digital di negara berkembang.

Keywords:

The Role of
Government;
Digital
Transformation;
Cyber Democracy;
Timor Leste

Abstract

As a post-conflict young country, Timor-Leste faces significant challenges in building effective and democratic governance. In the last decade, digital transformation has become a strategic agenda of the government to increase transparency, efficiency, and public participation. However, the implementation of digital policies and their impact on the development of digital democracy still needs to be studied comprehensively. This research aims to analyze the role of the Government of Timor Leste in encouraging digital transformation and its implications for the development of cyber democracy. The focus of the study is directed at the government's strategic policies in improving digital infrastructure, expanding access to information technology, and integrating digital-based public services as part of the country's modernization agenda. In addition, this study examines the extent to which these policies contribute to strengthening citizens'

political participation in the digital space, the formation of online public discourse, and the dynamics of digital politics in Timor Leste. The research method used is library research by examining academic literature, policy reports, and the latest statistical data. The analysis was carried out using the theoretical framework of network society and hybrid media system to understand the relationship between government digital policies, communication infrastructure, and internet-based democracy. The results show that digital transformation in Timor Leste has provided new opportunities for more inclusive political participation, but it is still faced with challenges in the form of digital divides, low technological literacy, and limited human resource capacity. This research is expected to contribute to the development of digital political studies and provide policy input to strengthen digital democracy in developing countries.

PENDAHULUAN

Timor-Leste, negara yang baru memperoleh kemerdekaan pada Mei 2002, telah menunjukkan perkembangan signifikan baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Berdasarkan data sensus yang dilakukan pada September 2022, total populasi Timor-Leste mencapai 1,341,737 jiwa (<https://inetl-ip.gov.tl/2023>), yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pertumbuhan jumlah penduduk ini berpotensi memperbesar partisipasi dalam berbagai proses sosial, termasuk partisipasi demokratis dan penggunaan fasilitas digital (Shrestha, Magar, & Rana, 2024).

Pada tahun 2023, adopsi teknologi digital di Timor-Leste menunjukkan tren yang menggembirakan, meskipun masih terdapat tantangan yang harus dihadapi. Berdasarkan laporan dari We Are Social Hootsuite mengenai penggunaan digital di awal tahun 2023, terdapat beberapa indikator penting terkait adopsi dan penggunaan teknologi digital di Timor Leste. Sebanyak 670,6 ribu orang di Timor-Leste terhubung ke internet, yang setara dengan penetrasi internet sebesar 49,6 persen dari total populasi. Pengguna media sosial di Timor-Leste mencapai 354,6 ribu pada Januari 2023, yang mencerminkan 26,2 persen dari total populasi negara tersebut. Selain itu, terdapat 1,44 juta koneksi seluler aktif yang berarti lebih dari satu koneksi per orang di Timor-Leste (106,6 persen dari total populasi) pada awal tahun 2023.

Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Timor-Leste, khususnya individu yang berusia di atas 18 tahun, semakin aktif dalam memanfaatkan platform digital untuk berbagai keperluan, termasuk untuk partisipasi dalam proses demokrasi (Anttiroiko, 2015). Berdasarkan analisis dari Kepios, pada periode antara 2022 dan 2023, jumlah pengguna internet meningkat sebanyak 47 ribu orang (7,5 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat semakin terbuka terhadap teknologi digital dan internet sebagai sarana untuk berdiskusi, memperoleh informasi, serta berpartisipasi dalam debat politik dan isu-isu global (Almukhlifi, Deng, & Kam, 2019).

Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi, tantangan baru muncul, termasuk penyebaran berita palsu atau hoaks yang menjadi salah satu isu utama di dunia maya (Regmi, 2020). Meski demikian, banyak manfaat positif yang dapat dirasakan, seperti penggunaan platform digital untuk membangun diskursus politik dan sosial, serta memperluas ruang bagi masyarakat untuk berdemokrasi secara virtual, yang dikenal dengan istilah cyber democracy (Kneuer, 2016). Hal ini memberikan ruang bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam diskusi politik dan mengambil bagian dalam proses demokrasi tanpa batasan geografis (Castells, 2023).

Berkaitan dengan hoaks Francesca Musiani dalam bukunya "The Role of Digital Media in Political Participation" (2018) menyatakan bahwa, "While digital platforms have

democratized the access to information, they have also facilitated the rapid spread of misinformation and fake news, which poses significant challenges to informed political participation." Hal ini menunjukkan bahwa meskipun media digital memberi akses luas terhadap informasi, platform baru ini juga menjadi sarana untuk penyebaran informasi yang menyesatkan atau hoaks (Paulin, 2017). Namun demikian ada banyak sisi positif dalam teknologi baru ini, sebagaimana di katakan oleh Manuel Castells dalam "Communication Power" (2009) menjelaskan bahwa, "The digital media have created new spaces for public debate, allowing individuals to express their views freely and to engage in political discourse, contributing to the formation of a 'global public sphere'." Ini menunjukkan bahwa media digital membuka ruang bagi debat politik dan komunikasi sosial yang lebih luas, yang bisa memperkaya proses demokrasi dan partisipasi publik.

Penelitian terdahulu telah memberikan landasan penting dalam memahami hubungan antara teknologi digital dan demokrasi. Hok & Pires (2018) dalam penelitiannya berjudul "The Role of Information and Communication Technology (ICT) in the Promotion of Democracy in Timor-Leste" fokus pada peran ICT dalam mempromosikan demokrasi, namun belum menyentuh aspek kebijakan pemerintah secara mendalam. Laporan Asian Development Bank (ADB, 2016) dan World Bank (2020) memberikan gambaran tentang perkembangan e-government dan peningkatan akses internet, tetapi lebih bersifat deskriptif dan kurang menganalisis implikasi politik dari transformasi digital tersebut. Penelitian Smith (2019) tentang administrasi publik dan transformasi digital memberikan perspektif global, namun tidak spesifik membahas konteks unik dan tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang seperti Timor-Leste.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang secara khusus menganalisis peran strategis pemerintah Timor-Leste—bukan hanya teknologi itu sendiri—dalam mendorong transformasi digital dan bagaimana peran tersebut secara langsung membentuk lanskap cyber democracy di negara tersebut. Penelitian ini mengisi celah dengan menghubungkan secara eksplisit kebijakan pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan inisiatif e-government dengan dinamika partisipasi politik digital, transparansi, dan tantangan disinformasi yang khas dialami Timor-Leste. Fokus pada peran pemerintah sebagai aktor utama dan analisis terhadap implikasi kebijakannya terhadap demokrasi digital merupakan kontribusi orisinal yang membedakan penelitian ini dari studi-studi sebelumnya.

Pemerintah Timor-Leste secara aktif mendukung transformasi digital ini, dengan fokus pada pengembangan infrastruktur digital dan upaya untuk menciptakan ekosistem yang mendukung demokrasi berbasis teknologi. Namun, pemerintah menghadapi sejumlah tantangan teknis, terutama terkait dengan keterbatasan infrastruktur internet di beberapa wilayah, yang masih mempengaruhi aksesibilitas dan kualitas penggunaan teknologi digital di kalangan masyarakat. Meskipun demikian, transformasi digital tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan sosial dan politik Timor-Leste, dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi publik dan memperkuat fondasi demokrasi di Timor Leste.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam peran pemerintah Timor-Leste dalam mendorong transformasi digital dan mengkaji implikasi dari kebijakan serta inisiatif digital tersebut terhadap perkembangan dan praktik cyber democracy di negara tersebut. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis berupa pengayaan literatur mengenai politik digital dan cyber democracy di konteks negara berkembang pasca-

konflik. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi para pembuat kebijakan di Timor-Leste dan negara dengan karakteristik serupa dalam merumuskan strategi transformasi digital yang lebih inklusif, efektif, dan mampu memperkuat fondasi demokrasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam peran pemerintah Timor-Leste dalam transformasi digital serta implikasinya terhadap perkembangan *cyber democracy*. Pendekatan utama yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis dokumen, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber sekunder. Sumber data tersebut mencakup literatur akademik seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah; laporan kebijakan dari lembaga internasional seperti Bank Dunia, ADB, dan OECD serta dokumen resmi pemerintah Timor-Leste; dan database serta statistik terkait penetrasi internet dan indikator pemerintahan digital. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema kunci seperti kebijakan digital, infrastruktur TIK, dan partisipasi politik. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan analisis teoritis dengan menggunakan kerangka pemikiran Manuel Castells tentang *network society* dan Andrew Chadwick tentang *hybrid media system* untuk menginterpretasikan hubungan antara kebijakan pemerintah, infrastruktur digital, dan dinamika *cyber democracy* di Timor-Leste.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi digital merujuk pada perubahan signifikan dalam cara masyarakat, organisasi, dan pemerintahan beroperasi berkat penerapan teknologi digital. Henriette et al. (2016) menggambarkan transformasi digital sebagai fenomena sosial yang melibatkan perubahan budaya mendalam di masyarakat yang didorong oleh teknologi digital. Di era ini, teknologi bukan hanya sekedar alat, melainkan juga pendorong utama perubahan cara hidup, berinteraksi, dan bekerja, yang berujung pada efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi. Seiring dengan berkembangnya Revolusi Industri 4.0, transformasi digital mendisrupsi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, sosial, dan politik.

Di Timor-Leste, penerapan transformasi digital di sektor administrasi publik menjadi fokus utama, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif. Meskipun tantangan masih ada, seperti literasi digital yang rendah, sektor ini telah memulai langkah-langkah strategis untuk mendigitalisasi berbagai aspek administrasi publik seperti sistem basis data dan pusat komunikasi pemerintah dalam Kabinet Sekretaris Negara untuk Komunikasi Sosial, terutama pada periode pemerintahan 2018-2023.

Dalam konteks Strategi Pemerintah dalam Transformasi Digital, The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mengemukakan bahwa pemerintah perlu mengembangkan dan menerapkan strategi pemerintahan digital yang mendukung transparansi, keterbukaan, dan inklusi dalam pengambilan keputusan dan penyampaian layanan publik. Dengan demikian, meskipun Timor Leste masih ada tantangan dalam mengadopsi teknologi secara menyeluruh, pemerintah mulai memperkenalkan mekanisme digital untuk menggantikan sistem analog sejak 2010-an, ketika pemerintah Timor Leste mengadopsi kebijakan yang

mendukung transformasi digital sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan efisiensi pemerintahan. Beberapa inisiatif digital yang signifikan dimulai pada awal 2010-an, seperti peluncuran portal transparansi pemerintah dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang lebih kuat untuk mendukung layanan publik dan partisipasi masyarakat, uraian tersebut digambarkan secara lengkap dalam laporan OECD (2016).

Transformasi digital di sektor publik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempermudah akses informasi, mengurangi birokrasi, dan mendorong keputusan berbasis data. Langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Timor-Leste termasuk meningkatkan jaringan telekomunikasi, memperkenalkan platform digital bagi pelayanan publik, dan mengembangkan sistem yang lebih transparan dan inklusif. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerangka kelembagaan yang tepat, alokasi anggaran yang memadai, serta kebijakan yang mendukung implementasi digital secara koheren. Dalam konteks ini, pemerintahan yang akan datang perlu terus menjadikan kebijakan transformasi digital sebagai salah satu prioritas utama, dalam program politiknya.

Meskipun beberapa kemajuan telah dicapai, namun perlu diakui bahwa pemerintah juga mengalami tantangan dalam Transformasi Digital di Timor-Leste. Beberapa tantangan berikut yang ditemui dalam penelitian di Timor Leste, misalnya Literasi Digital yang Rendah; dalam hal ini walaupun ada prioritas program kampanye untuk meningkatkan literasi digital, terutama yang dilakukan oleh kabinet Sekretaris Negara Urusan Komunikasi sosial periode pemerintahan 2018-2023, namun masyarakat di daerah pedesaan dan kelompok lanjut usia masih terbatas dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi secara cerdas.

Selain itu, kurangnya Infrastruktur dan Konektivitas, yakni masih terdapat kekurangan infrastruktur teknologi, misalnya tidak adanya akses internet atau kalau pun ada biaya internet yang mahal terutama di wilayah pedesaan, yang menghambat implementasi solusi digital secara lebih luas dan merata. Adanya Keterbatasan Penggunaan Teknologi di Pemerintah, meskipun beberapa perangkat teknologi sudah ada di pemerintahan, pemanfaatannya masih terbatas, seperti penggunaan infrastruktur internet yang disediakan oleh TIK-Timor yang tidak konsisten. Misalnya beberapa kementerian besar seperti kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian dan seterusnya (terjadi dalam periode pemerintahan 2018-2023), masih lebih nyaman menggunakan fasilitas internet internal atau bahkan fasilitas internet dari pihak swasta, dibandingkan dengan fasilitas internet dan sistem basis data yang dibangun oleh TIK-Timor sebagai lembaga IT resmi dari pemerintah. Fenomena ini terjadi karena masih terdapat keraguan dari beberapa kementerian terhadap kemampuan mengelola sistem data dari TIK-Timor, terutama yang berkaitan dengan perlindungan data kemeterian.

Faktor lain yang juga menjadi tantangan adalah keamanan dan Perlindungan Data. Masalah perlindungan data pribadi dan keamanan cyber merupakan tantangan besar. Timor-Leste belum memiliki undang-undang khusus untuk mengatur perlindungan data, meskipun telah ada rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah ke Parlemen Timor Leste, sayangnya hingga tahun 2023, rancangan UU ini belum ditetapkan oleh parlemen Timor Leste, artinya sejauh ini masih hanya sebagai rancangan, jadi tentu belum dapat dianggap sebagai UU yang berketetapan hukum. Selain persoalan UU, biaya internet juga masih tinggi, meskipun harga internet sedikit menurun pada bulan-bulan akhir tahun 2024 karena telah ada persaingan

pasar internet dari beberapa operator internet seperti Telkomcel, Timor Telkom, Telemor, masuknya Starlink dan operator kecil lainnya, namun biaya akses internet tetap saja menjadi masalah, terutama di daerah-daerah pedesaan dengan kondisi ekonomi yang kurang stabil. Beberapa hal berikut juga menjadi tantangan yang signifikan, misalnya kesenjangan akses antara Kota dan Pedesaan; yakni akses ke internet dan teknologi lainnya sangat berbeda antara penduduk kota dan pedesaan, dengan wilayah pedesaan seringkali tertinggal dalam hal konektivitas. Pada saat yang sama proses pendaftaran tanah dan properti yang belum digital juga menyulitkan pemerintah, karena sistem pendaftaran tanah yang belum terintegrasi secara digital menghambat efisiensi dan transparansi di sektor properti. Bahkan dalam hal identifikasi warga negara, sebagian besar penduduk masih belum memiliki kartu identitas resmi, yang memperlambat proses digitalisasi layanan publik. Dalam sektor vital seperti sektor kesehatan pun, masih mengalami keterbatasan Teknologi di Sektor Kesehatan, yakni hingga akhir tahun 2024, sektor kesehatan di beberapa daerah kabupaten, terutama di daerah pedesaan masih sangat bergantung pada sistem non-digital, meskipun telah ada inisiatif untuk meningkatkan akses melalui teknologi.

Kemajuan dalam Transformasi Digital di Timor-Leste

Meskipun tantangan besar dihadapi, beberapa kemajuan signifikan telah dicapai, misalnya dengan adanya pembentukan Badan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIC-I.P) pada tahun 2017 telah mendukung implementasi e-Government dan meningkatkan konektivitas serta keamanan data. Selanjutnya Rencana Strategis Nasional Digital Timor 2032 yang disetujui pada tahun 2023, yang berfokus pada pengembangan teknologi digital untuk sektor publik, termasuk pemerintahan elektronik, ekonomi inklusif, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, telah ada pengembangan Sistem Identifikasi Unik (single identification) untuk memudahkan akses layanan publik dan mengurangi penipuan identitas. Adanya penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah FreeBalance untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara (<https://freebalance.com/en/customer-story/timor-leste/>), serta pengembangan Portal Transparansi Dana Bantuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas bantuan internasional (<http://www.transparency.gov.tl/>). Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun dalam proses transformasi digital menghadapi beberapa tantangan, namun di saat yang sama Pemerintah Timor Leste mengalami beberapa kemajuan yang cukup positif.

Transparansi Politik dan Cyber Democracy di Timor-Leste

Dengan adanya transformasi digital, ruang untuk partisipasi masyarakat semakin terbuka. Demokrasi virtual memungkinkan masyarakat lebih mudah terlibat dalam diskusi politik dan memberikan umpan balik kepada pemerintah. Hal ini juga meningkatkan transparansi pemerintahan, karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan mengawasi kebijakan publik. Partisipasi masyarakat melalui media sosial dan platform digital telah membantu mempercepat respons pemerintah terhadap isu-isu publik. Misalnya pada periode pemerintahan 2018-2023, masyarakat terutama anggota lembaga swadaya masyarakat, dapat saja mengirim video pendek tentang persoalan infrastruktur air bersih di sebuah desa ke nomor

watsapp Menteri Infrastruktur secara langsung, dan selanjutnya persoalan yang disampaikan terjawab secara cepat.

Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan diskusi tentang persoalan infrastruktur lainnya seperti pembangunan jalan raya, jembatan, infrastruktur pendidikan dan seterusnya di dunia maya, sehingga menjadikan isu tertentu menjadi viral dan akhirnya kementerian terkait melakukan respons secara cepat dari Pemerintah. Pada saat yang sama lewat dunia maya, masyarakat dapat melakukan kritis terhadap kinerja pemerintah, atau bahkan melakukan dialog secara terbuka dengan perwakilan pemerintah atau dengan anggota parlemen. Praktek-prakter ini merupakan dampak positif adanya media digital, yakni memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan tentu saja mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah, sehingga pemerintah menjadi lebih terbuka, bertanggung jawab dan transparan dalam mengelolah pemerintahan (OECD, 2014).

Studi Kasus Cyber Democracy di Timor Leste

Timor Leste telah melangkah signifikan dalam transformasi digital sejak tahun 2010-an, dengan tujuan memperkuat pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif. Sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 2002, Timor Leste menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem pemerintahan yang efisien, termasuk dalam hal transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses politik (Kocharyan, Hamulák, & Vardanyan, 2024; Mendonça, Damásio, Silva, & Cardoso, 2025). Dengan adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), negara ini mulai mengimplementasikan kebijakan cyber democracy untuk memfasilitasi interaksi yang lebih langsung antara pemerintah dan warga negara. Langkah pertama dimulai dengan pengembangan infrastruktur internet dan kebijakan yang mendukung akses digital, sebagaimana dalam periode pemerintahn 2018-2023 telah menetapkan proyek infrastruktur Submarine Cable dari Australia ke Timor Leste, dengan tujuan untuk mempercepat akses internet secara cepat dan murah kepada seluruh masyarakat Timor Leste. Transformasi ini juga mencakup pelatihan bagi pejabat pemerintah dan warga negara dalam menggunakan platform digital untuk meningkatkan partisipasi dalam proses demokrasi. Penjelasan tersebut dapat ditelaah lebih jauh dalam tulisan Hok, S., & Pires, L. (2018). "The role of information and communication technology (ICT) in the promotion of democracy in Timor-Leste." *Asian Journal of Comparative Politics*, 4(3), 215-225.

Sebelum kebijakan transformasi digital, akses internet di Timor Leste terbatas, dan tingkat partisipasi publik dalam pengambilan keputusan pemerintahan relatif rendah. Banyak warga negara yang kesulitan mengakses informasi tentang kebijakan pemerintah, sementara data pemerintah seringkali terbatas dan sulit diakses (Holgersson & Karlsson, 2014; Kar, Ilavarasan, Gupta, Janssen, & Kothari, 2024). Namun, setelah implementasi kebijakan transformasi digital yang dimulai pada 2010-an, terutama dengan inisiatif seperti portal transparansi pemerintah, pembentukan badan-badan digital, dan kampanye e-government, telah terjadi peningkatan signifikan dalam keterlibatan publik (Chadwick, 2017; Dwivedi, Rana, Janssen, Lal, Williams, & Clement, 2017). Warga negara kini dapat mengakses data publik, memberikan masukan melalui platform online, dan bahkan ikut serta dalam survei serta konsultasi publik. Uraian tersebut diperkuat dengan laporan dari Asian Development Bank (ADB). (2016). *Timor-Leste: E-Government and ICT Policy and Strategy* (Esselimani, 2021; Gasco-Hernandez, Equiza-Lopez, & Acevedo-Ruiz, 2018). ADB Publication. Dalam laporan

ADB menguraikan bagaimana kebijakan e-government yang diterapkan sejak awal 2010-an telah mengubah lanskap pemerintahan Timor Leste (Musiani, 2018). Sebelum kebijakan tersebut, partisipasi publik dalam pemerintahan sangat terbatas, namun setelah kebijakan ini diterapkan, terjadi peningkatan signifikan dalam akses informasi dan keterlibatan warga melalui platform online (Henriette, Tan, & Wende, 2016).

Sebagai contoh, pada tahun 2020, sekitar 60% dari total populasi telah memiliki akses internet, dibandingkan dengan hanya 20% pada tahun 2010. Data pemerintah kini lebih mudah diakses melalui portal yang diluncurkan oleh pemerintah Timor Leste. Selain itu, partisipasi publik dalam perumusan kebijakan juga mengalami peningkatan, dengan lebih banyak masyarakat yang memberikan umpan balik mengenai kebijakan melalui platform digital. Transformasi digital ini juga mendukung pemilihan umum yang lebih transparan, dengan hasil yang lebih mudah diakses oleh publik secara real-time, yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi (Miconi, 2023). Hal ini diperkuat dalam laporan dari World Bank (2020) yang mengungkapkan peningkatan signifikan dalam akses internet dan transparansi pemerintahan di Timor Leste. Laporan ini mencatat bahwa pada tahun 2020, sekitar 60% dari populasi Timor Leste sudah memiliki akses internet, meningkat pesat dari hanya 20% pada 2010. Selain itu, laporan ini juga menyebutkan peluncuran portal pemerintah yang memungkinkan masyarakat mengakses data publik dengan lebih mudah dan partisipasi lebih besar dalam pembuatan kebijakan melalui platform digital (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2024).

Dengan demikian, studi kasus transformasi digital Timor Leste menunjukkan bagaimana pengadopsian teknologi dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam pemerintahan. Meskipun masih ada tantangan, seperti keterbatasan akses di daerah pedesaan dan kesenjangan digital, kebijakan cyber democracy telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam memperkuat demokrasi di Timor Leste, sebagai sebuah negara baru.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi digital di Timor-Leste telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi layanan publik, transparansi informasi, dan perluasan partisipasi politik melalui perkembangan cyber democracy. Meskipun pemerintah telah menunjukkan komitmen melalui berbagai kebijakan pembangunan infrastruktur TIK dan pengembangan e-government, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan akses digital, rendahnya literasi digital masyarakat, resistensi birokrasi, serta ancaman disinformasi yang membatasi optimalisasi manfaat transformasi digital. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa saran strategis, yakni: pertama, pemerintah perlu mempercepat pengesahan regulasi perlindungan data pribadi untuk menjamin keamanan siber; kedua, mengembangkan program literasi digital yang inklusif dan menyeluruh, khususnya bagi masyarakat pedesaan dan lanjut usia; ketiga, meningkatkan investasi dan kolaborasi publik-swasta dalam pembangunan infrastruktur digital di daerah terpencil; serta keempat, bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menerapkan pendekatan metode campuran (mixed methods) guna mengukur tingkat partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap cyber democracy secara lebih komprehensif dan empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Almukhlifi, A., Deng, H., & Kam, B. (2019). Critical factors for the adoption of e-government in developing countries: Validation of a measurement model. *Proceedings of the 12th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance*, 419–428. <https://doi.org/10.1145/3326365.3326418>
- Anttiroiko, A.-V. (2015). Networks in Manuel Castells' theory of the network society. MPRA Paper No. 65617. University Library of Munich. <https://ideas.repec.org/p/pramprapa/65617.html>
- Castells, M. (2023). The network society revisited. *American Behavioral Scientist*, 67(4), 456–475. <https://doi.org/10.1177/00027642221092803>
- Chadwick, A. (2017). *The hybrid media system: Politics and power* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Dwivedi, Y. K., Rana, N. P., Janssen, M., Lal, B., Williams, M. D., & Clement, M. (2017). An empirical validation of a unified model of electronic government adoption (UMEGA). *Government Information Quarterly*, 34(2), 211–230. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.03.001>
- Esselimani, K. (2021). E-government effect on participatory democracy in the Maghreb: Indirect effect and government-led participation. *Discrete Dynamics in Nature and Society*, 2021, Article 6642998. <https://doi.org/10.1155/2021/6642998>
- Gasco-Hernandez, M., Equiza-Lopez, F., & Acevedo-Ruiz, M. (2018). Stages and determinants of e-government development: A twelve-year longitudinal study of global cities. *Public Performance & Management Review*, 41(4), 738–760. <https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1467987>
- Henriette, E., Tan, S., & Wende, M. (2016). *Digital transformation: Concept and framework*. Springer.
- Hok, S., & Pires, L. (2018). The role of information and communication technology (ICT) in the promotion of democracy in Timor-Leste. *Asian Journal of Comparative Politics*, 4(3), 215–225.
- Holgersson, J., & Karlsson, F. (2014). Public e-service development: Understanding citizens' conditions for participation. *Government Information Quarterly*, 31(3), 396–410. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.02.006>
- Kar, A. K., Ilavarasan, V., Gupta, M. P., Janssen, M., & Kothari, R. (2024). Untangling the web between digital citizen empowerment, accountability and quality of participation experience for e-government: Lessons from India. *Government Information Quarterly*, 41(2), Article 101942. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2024.101942>
- Kneuer, M. (2016). E-democracy: A new challenge for measuring democracy. *International Political Science Review*, 37(5), 666–678. <https://doi.org/10.1177/0192512116657677>
- Kocharyan, H., Hamulák, O., & Vardanyan, L. (2024). E-democracy and Internet access in EU law: Strengthening democratic participation in the digital age. *International and Comparative Law Review*, 24(2), 106–123. <https://doi.org/10.2478/iclr-2024-0020>
- Mendonça, S., Damásio, B., Silva, S., & Cardoso, G. (2025). The "network society" moves in mysterious ways: 25 years in the reception of a core concept. *Quantitative Science Studies*, 6(1), 123–145. https://doi.org/10.1162/qss_a_00366
- Miconi, A. (2023). The network and the society: Structure and agency in Castells' theory. *American Behavioral Scientist*, 67(4), 476–492.

- <https://doi.org/10.1177/00027642221092805>
- Musiani, F. (2018). The role of digital media in political participation. Cambridge: MIT Press.
- OECD. (2014). Digital government: The way forward. OECD Publishing.
- Paulin, A. (2017). Smart city governance. Elsevier.
- Regmi, K. (2020). Impacts of the digital divide on the e-government portals of Nepal. In S. Saeed, T. Ramayah, & Z. Mahmood (Eds.), User centric e-government (pp. 287–312). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39927-4_13
- Shrestha, A., Magar, D. B., & Rana, N. P. (2024). e-Governance, citizen satisfaction and net benefits: The moderating effect of digital divide. *Cogent Business & Management*, 11(1), Article 2402512. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2402512>
- Smith, J. (2019). Public administration and digital transformation: A global perspective. *Journal of Public Administration*, 45(3), 123–145. <https://doi.org/10.1007/journalofadmin.2019.031>
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2024). E-government survey 2024: Digital government in the decade of action for sustainable development. United Nations. <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2024>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).